



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### LATAR BELAKANG

#### PENJELASAN UMUM

##### **A. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Desember 2020 Nomor : 120.04/6931/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

## **B. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5' – 112°9' Bujur Timur dan 7°3' – 7°5' Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :



- 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambangan yang berair asin / payau berada di belahan timur meliputi 29,99% dari luas wilayah;
- 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar meliputi 40,81% dari luas wilayah; dan
- 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat meliputi 29,20% dari luas wilayah.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

**Tabel I.2**  
**Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Tinggi Rata – Rata (m dpl)	luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	4	62.560
2	Buduran	4	41.030
3	Candi	4	40.670
4	Porong	4	29.820
5	Krembung	5	29.550
6	Tulangan	7	31.210
7	Tanggulangin	4	32.290
8	Jabon	2	81.000
9	Krian	12	32.500
10	Balongbendo	20	31.400
11	Wonoayu	4	33.920
12	Tarik	16	36.060
13	Prambon	10	34.230
14	Taman	9	31.540
15	Waru	5	30.320
16	Gedangan	4	24.060
17	Sedati	4	79.430
18	Sukodono	7	32.680
<b>Jumlah</b>			<b>714.240</b>

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019



Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kandungan gas bumi yang dibentuk oleh batuan *alluvium* seluas 686,89 Ha tersebar disemua kecamatan, batuan *plistosen fasien sedimen* terdapat di 6 kecamatan, tanah *alluvial* kelabu merata di 18 kecamatan, *assosiasi alluvial* kelabu dan coklat kekuningan terdapat di 4 kecamatan, yaitu : Krembung, Balongbendo, Tarik, dan Prambon.

**Tabel I.3**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan**  
**Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen (Ha)	Alluvium (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	42,00	6.214,00	6.256,00
2	Buduran	1.469,00	2.633,50	4.102,50
3	Candi	-	40,67	4.066,75
4	Porong	-	29,82	2.982,25
5	Krembung	-	29,55	2.955,00
6	Tulangan	-	31,21	3.120,50
7	Tanggulangin	-	32,29	3.229,00
8	Jabon	-	81,00	8.099,75
9	Krian	-	32,50	3.250,00
10	Balongbendo	-	31,40	3.140,00
11	Wonoayu	-	33,92	3.392,00
12	Tarik	-	36,06	3.606,00
13	Prambon	-	34,23	3.422,50
14	Taman	448,00	2.705,50	3.153,50
15	Waru	384,00	2.648,00	3.032,00
16	Gedangan	38,00	2.367,75	2.405,75
17	Sedati	355,00	7.588,00	7.943,00
18	Sukodono	-	32,68	3.267,75
	<b>Jumlah</b>	<b>2.736,00</b>	<b>24.602,07</b>	<b>71.424,25</b>

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

**Tabel I.4**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan**  
**Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	2.966,11	-	3.289,89	-	6.256,00
2	Buduran	1.480,02	-	1.853,22	769,26	4.102,50
3	Candi	1.552,88	-	2.513,87	-	4.066,75



No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
4	Porong	2.083,07	-	899,18	-	2982,25
5	Krembung	2.500,95	454,05	-	-	2.955,00
6	Tulangan	3.120,50	-	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	1.564,77	-	1.664,23	-	3.229,00
8	Jabon	2.580,20	-	5.519,55	-	8.099,75
9	Krian	3.250,20	-	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	3.250,00	2.795,55	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	3.392,00	-	-	-	3.392,00
12	Tarik	2.618,93	987,07	-	-	3.606,00
13	Prambon	2.688,94	733,56	-	-	3.422,50
14	Taman	3.153,50	-	-	-	3.153,50
15	Waru	2.020,67	-	1.011,33	-	3.032,00
16	Gedangan	2.304,31	-	-	101,44	2.405,75
17	Sedati	3.333,04	-	4.609,96	-	7.943,00
18	Sukodono	3.267,75	-	-	-	3.267,75
<b>Jumlah</b>		<b>47.017,64</b>	<b>4.970,23</b>	<b>21.361,23</b>	<b>870,70</b>	<b>71.424,25</b>

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter di bawah permukaan tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, banjir periodik di sebagian 5 (lima) kecamatan, dan banjir karena air pasang berada di sebagian 4 (empat) kecamatan.

**Tabel I.5**

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2019**

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4.063,62	308,14	-	-	6.256,00
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krembung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50



No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
<b>Total</b>		<b>16.312,67</b>	<b>1.573,75</b>	<b>610,40</b>	<b>2.018,55</b>	<b>71.424,25</b>

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah di bulan Agustus.

**Tabel I.6**  
**Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019**

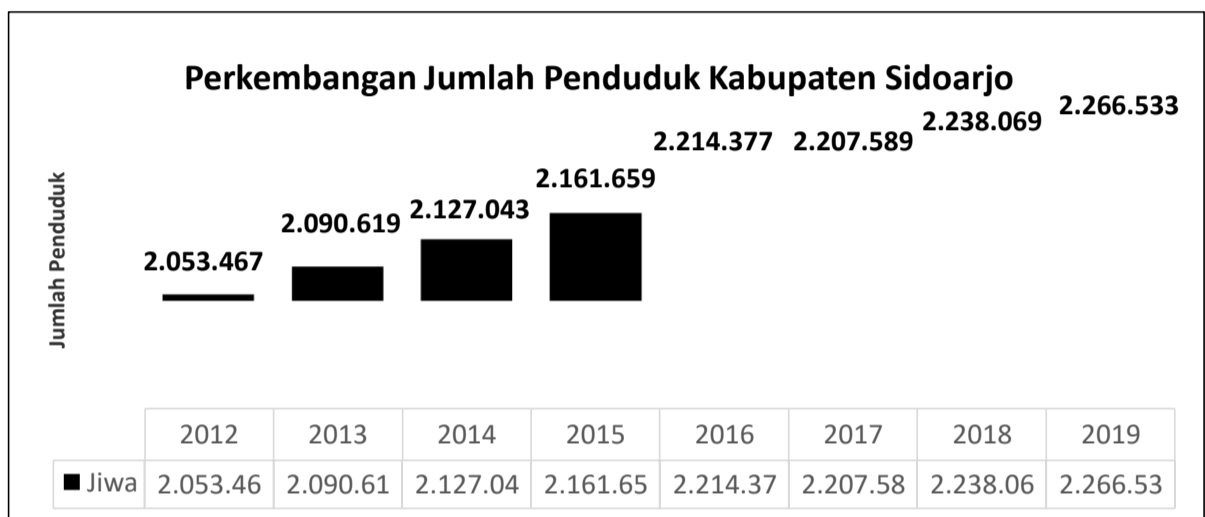
No	Lokasi Penakar Hujan	B U L A N											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Kemlaten	226.0	442.0	152.0	229.0	-	16.0	-	-	-	-	91.8	374.0
2	Ponokawan	196.0	909.0	313.0	189.0	-	23.0	-	-	-	-	231.0	222.0
3	Bakalan	261.0	470.0	268.0	109.0	-	18.0	-	-	-	-	182.0	197.0
4	Krian	173.0	377.0	325.0	175.0	-	20.0	-	-	-	-	216.0	198.0
5	Ketawang	280.0	450.0	318.0	135.0	-	27.0	-	-	-	-	242.5	223.5
6	Ketintang	250.0	483.0	252.0	234.0	-	24.0	-	-	-	-	130.2	234.0
7	Watutulis	238.0	398.0	228.0	178.0	-	20.0	-	-	-	-	290.0	243.0
8	Pertapan Maduretno	242.0	436.0	361.0	111.8	-	27.0	-	-	-	-	236.0	279.0
9	Cepicles	159.0	361.0	191.0	136.0	-	18.0	-	-	-	-	25.0	220.0
10	Luwung	176.0	438.0	228.0	183.0	-	20.0	-	-	-	-	42.0	241.0
11	Gedangrowo	111.1	322.0	144.0	166.0	-	15.0	-	-	-	-	98.0	121.0
12	Prambon	136.0	438.0	169.0	138.0	-	19.0	-	-	-	-	143.0	181.0
13	Botokan	292.0	529.0	410.0	174.0	-	32.0	-	-	-	-	191.0	214.0
14	Durungbedug	253.0	583.0	196.0	217.0	-	31.0	-	-	-	-	174.0	157.0
15	Bono	301.0	432.0	497.0	124.0	-	53.0	-	-	-	-	126.0	187.0
16	Sruni	359.0	578.0	523.0	147.0	-	35.0	-	-	-	-	240.0	278.0
17	Sedati	346.0	336.0	457.0	257.0	-	49.0	-	-	-	-	76.0	207.0
18	Bankar Kemantren	227.0	548.0	453.0	191.0	-	27.0	-	-	-	-	203.0	337.0
19	Ketegan	406.0	473.0	539.0	292.0	-	60.0	-	-	-	-	74.0	379.0
20	Sumpat	66.0	295.0	91.0	47.0	-	4.0	-	-	-	-	62.0	135.0
21	Klagen	256.0	269.0	76.0	88.0	-	5.0	-	-	-	-	287.0	229.0
22	Karangnongko	267.0	543.0	248.0	111.0	-	22.0	-	-	-	-	145.0	163.0
23	Sidoarjo	-	490.0	247.0	235.0	-	36.0	-	-	-	-	119.0	209.0
24	Kludan	201.0	441.0	344.0	167.0	-	15.0	-	-	-	-	67.0	254.0
25	Putat	284.0	518.0	334.0	138.0	-	-	-	-	-	-	44.0	211.0
26	Kedung Cangkring	152.0	371.0	248.0	37.0	-	-	-	-	-	-	48.0	80.0
27	Porong	189.0	423.0	259.0	65.0	-	14.0	-	-	-	-	68.0	125.0
28	Krembung / Biting	129.0	391.0	80.0	122.0	-	4.0	-	-	-	-	49.0	98.0
29	Bedugbulus	140.0	399.0	113.0	168.0	-	5.0	-	-	-	-	136.0	154.0
30	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rata-Rata</b>		<b>217.8</b>	<b>453.2</b>	<b>278.1</b>	<b>155.6</b>	<b>0.0</b>	<b>22.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>141.4</b>	<b>210.6</b>

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

### C. JUMLAH PENDUDUK

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2020, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.033.764 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

**Grafik I.2**



Sumber data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 207.817 jiwa, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 56.266 jiwa. Jumlah penduduk per Kecamatan dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel I.7**

**Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)  
Per Kecamatan Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	TARIK	69.189	22.614
2	PRAMBON	79.952	26.231
3	KREMBUNG	69.887	22.530
4	PORONG	73.446	23.892
5	JABON	56.266	18.167
6	TANGGULANGIN	89.804	27.919
7	CANDI	153.423	47.630



8	SIDOARJO	201.115	63.231
9	TULANGAN	102.339	33.586
10	WONOAYU	85.526	27.367
11	KRIAN	130.730	41.659
12	BALONGBENDO	76.050	24.744
13	TAMAN	207.817	66.235
14	SUKODONO	121.897	37.716
15	BUDURAN	98.910	30.780
16	GEDANGAN	120.003	37.218
17	SEDATI	96.636	30.587
18	WARU	200.774	64.919
	<b>TOTAL</b>	<b>2,033,764</b>	<b>647.025</b>

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel I.8**

**Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020**

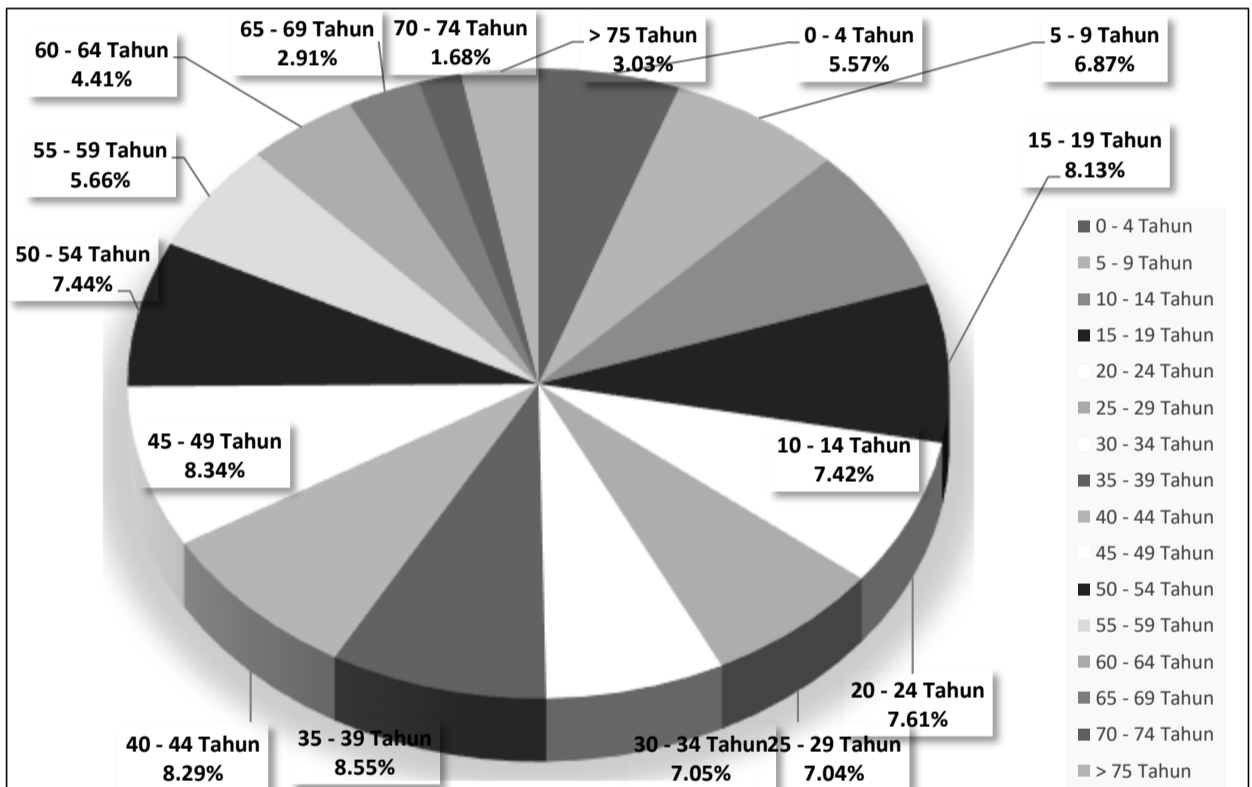
NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	34.830	34.359	69.189
2	PRAMBON	40.397	39.555	79.952
3	KREMBUNG	35.024	34.863	69.887
4	PORONG	37.102	36.344	73.446
5	JABON	28.274	27.992	56.266
6	TANGGULANGIN	45.097	44.707	89.804
7	CANDI	76.872	76.551	153.423
8	SIDOARJO	100.000	101.115	201.115
9	TULANGAN	51.423	50.916	102.339
10	WONOAYU	43.109	42.417	85.526
11	KRIAN	66.413	64.317	130.730
12	BALONGBENDO	38.449	37.601	76.050
13	TAMAN	104.755	103.062	207.817
14	SUKODONO	61.833	60.064	121.897
15	BUDURAN	49.910	49.000	98.910
16	GEDANGAN	60.286	59.717	120.003
17	SEDATI	48.821	47.815	96.636
18	WARU	99.953	100.821	200.774
	<b>TOTAL</b>	<b>1.022.548</b>	<b>1.011.216</b>	<b>2.033.764</b>

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya usia tua. Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 15 tahun sampai dengan 19 tahun.

**Grafik I.3**  
**Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2019**



Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel I.9**  
**Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

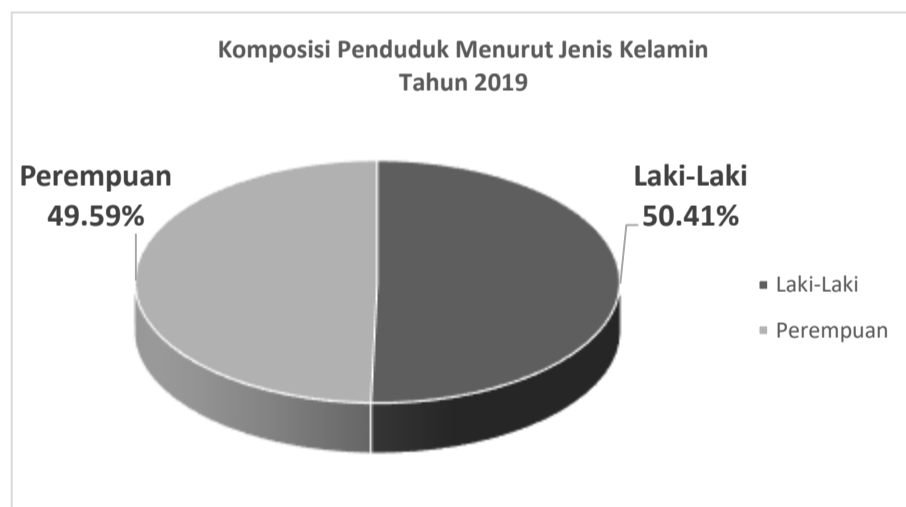
NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0-4	63.703	58.934	122.637
2.	5-9	78.832	73.831	152.663
3.	10-14	83.399	77.919	161.318

4.	15-19	84.004	78.791	162.795
5.	20-24	78.213	75.501	153.714
6.	25-29	76.534	74.137	150.671
7.	30-34	71.090	68.943	140.033
8.	35-39	81.037	81.627	162.664
9.	40-44	77.345	81.097	158.442
10.	45-49	77.427	82.760	160.187
11.	50-54	73.300	75.310	148.610
12.	55-59	58.374	62.394	120.768
13.	60-64	48.478	46.929	95.407
14.	65-69	32.586	29.239	61.825
15.	70-74	15.475	17.303	32.778
16.	> 75	22.611	26.641	49.252
<b>TOTAL</b>		<b>1.022.408</b>	<b>1.011.356</b>	<b>2.033.764</b>

*Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.022.408 jiwa atau 50,27%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.011.356 jiwa atau 49,73%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

**Grafik I.4**



*Sumber : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan Lulusan SMA Sederajat, yaitu **39,21%** dari jumlah penduduk. Meski demikian, masih ada **60,79%** penduduk Kabupaten Sidoarjo yang masih berpendidikan rendah atau Lulusan SD Sederajat.



Komposisi penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel berikut :

**Tabel I.10**

**Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	LULUSAN SD	LULUSAN SMP	LULUSAN SMA	LULUSAN S1	LULUSAN S2	TOTAL
1	TARIK	16.359	13.390	17.673	2.067	72	49.561
2	PRAMBON	18.477	14.201	22.597	2.930	88	58.293
3	KREMBUNG	13.825	12.630	20.042	2.473	87	49.057
4	PORONG	15.643	12.682	19.207	2.775	120	50.427
5	JABON	13.945	10.911	13.584	1.630	49	40.119
6	TANGGULANGIN	17.070	15.417	25.717	4.737	201	63.142
7	CANDI	25.530	21.222	44.841	12.031	627	104.251
8	SIDOARJO	27.411	24.501	58.968	24.910	1.523	137.313
9	TULANGAN	18.719	17.054	31.518	4.747	161	72.199
10	WONOAYU	20.446	13.367	21.721	3.474	131	59.139
11	KRIAN	25.297	20.737	37.012	6.879	248	90.173
12	BALONGBENDO	16.246	13.794	19.762	2.643	84	52.529
13	TAMAN	30.543	28.769	68.332	17.018	1.076	145.738
14	SUKODONO	19.120	17.342	38.261	9.519	437	84.679
15	BUDURAN	12.972	14.106	31.061	9.401	578	68.118
16	GEDANGAN	16.815	16.547	36.505	10.373	563	80.803
17	SEDATI	15.429	13.056	30.326	7.734	652	67.197
18	WARU	23.441	25.481	62.121	24.993	1.856	137.892
	<b>TOTAL</b>	347.288	305.207	599.248	150.334	8.553	1.410.630

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.11**

**Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019**

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	615.678	45.	USTADZ/MUBALIGH	113
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	118.096	46.	JURU MASAK	30
3	PELAJAR/MAHASISWA	325.217	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	15.685	48.	ANGGOTA DPR RI	3
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	27.382	49.	ANGGOTA DPD RI	1
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	13.915	50.	ANGGOTA BPK	1
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	4.655	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	17.764	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	41.640	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0



10	PETERNAK	48	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	787	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	166	56.	GUBERNUR	0
13	KONSTRUKSI	192	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	189	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	718.225	59.	WAKIL BUPATI	0
16	KARYAWAN BUMN	5.685	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	562	61.	WAKIL WALIKOTA	0
18	KARYAWAN HONORER	689	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.759	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	14
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.966	64.	DOSEN	2.627
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	65.	GURU	20.728
22	BURUH PETERNAKAN	17	66.	PILOT	42
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	326	67.	PENGACARA	126
24	TUKANG CUKUR	20	68.	NOTARIS	85
25	TUKANG LISTRIK	65	69.	ARSITEK	41
26	TUKANG BATU	1.046	70.	AKUNTAN	16
27	TUKANG KAYU	212	71.	KONSULTAN	69
28	TUKANG SOL SEPATU	26	72.	DOKTER	1.361
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	102	73.	BIDAN	1.274
30	TUKANG JAHIT	429	74.	PERAWAT	2.334
31	TUKANG GIGI	4	75.	APOTEKER	183
32	PENATA RIAS	48	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	20
33	PENATA BUSANA	6	77.	PENYIAR TELEVISI	1
34	PENATA RAMBUT	36	78.	PENYIAR RADIO	4
35	MEKANIK	240	79.	PELAUT	245
36	SENIMAN	72	80.	PENELITI	7
37	TABIB	18	81.	SOPIR	3.445
38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	9	83.	PARANORMAL	10
40	PENTERJEMAH	6	84.	PEDAGANG	13.434
41	IMAM MASJID	5	85.	PERANGKAT DESA	2.442
42	PENDETA	131	86.	KEPALA DESA	219
43	PASTOR	4	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	8
44	WARTAWAN	155	88.	WIRASWASTA	70.280
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	248
				<b>JUMLAH</b>	<b>2.033.764</b>

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebesar 35,31 %. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 3,45%, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebesar 2,03%, yang berkecukupan pada bisnis perdagangan



sebesar 0,87%, dan pedagang sebesar 0,66%. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian ini tidak lepas dari struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

#### D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*).

**Tabel I.1**

**Desa dan Kelurahan per Kecamatan**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongsendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>322</b>	<b>31</b>

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

#### Grafik I.1



### Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

### E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

NO.	Nama	JML
1.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	4
3.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	12
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	8
5.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	16
6.	Bagian Perekonomian Dan Sda Sekretariat Daerah	10
7.	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	10
8.	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah	37
9.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	12
10.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	26
11.	Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	29
12.	Sekretariat Dprd	57
13.	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	2
14.	Inspektorat Daerah	70
15.	Badan Kepegawaian Daerah	76
16.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75
19.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	70
20.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	61
21.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	292



22.	Dinas Perikanan	43
23.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	52
24.	Dinas Kesehatan	84
25.	Uptd Puskesmas Balongbendo	55
26.	Uptd Puskesmas Barengkrajan	38
27.	Uptd Puskesmas Buduran	51
28.	Uptd Puskesmas Candi	56
29.	Uptd Puskesmas Gedangan	44
30.	Uptd Puskesmas Jabon	65
31.	Uptd Puskesmas Kedungsolo	35
32.	Uptd Puskesmas Kepadangan	40
33.	Uptd Puskesmas Krembung	57
34.	Uptd Puskesmas Krian	73
35.	Uptd Puskesmas Medaeng	42
36.	Uptd Puskesmas Porong	81
37.	Uptd Puskesmas Prambon	67
38.	Uptd Puskesmas Sedati	65
39.	Uptd Puskesmas Sekardangan	36
40.	Uptd Puskesmas Sidoarjo	44
41.	Uptd Puskesmas Sukodono	75
42.	Uptd Puskesmas Taman	89
43.	Uptd Puskesmas Tanggulangin	55
44.	Uptd Puskesmas Tarik	64
45.	Uptd Puskesmas Trosobo	37
46.	Uptd Puskesmas Tulangan	37
47.	Uptd Puskesmas Urang Agung	38
48.	Uptd Puskesmas Waru	55
49.	Uptd Puskesmas Wonoayu	67
50.	Uptd Puskesmas Ganting	33
51.	Uptd Instalasi Farmasi	9
52.	Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah	3
53.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	41
54.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	139
55.	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	58
56.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	63
57.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	60
58.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	158
59.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Balongbendo	188
60.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Buduran	185
61.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Candi	248



62.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Gedangan	225
63.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Jabon	156
64.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Krembung	180
65.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Krian	263
66.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Porong	168
67.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Prambon	189
68.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Sedati	175
69.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Sidoarjo	392
70.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Sukodono	261
71.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Taman	411
72.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Balongbendo	36
73.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Balongbendo	32
74.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Buduran	41
75.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Buduran	39
76.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Candi	34
77.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Candi	43
78.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Candi	34
79.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Gedangan	47
80.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Gedangan	45
81.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Tanggulangin	161
82.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Jabon	40
83.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Jabon	33
84.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Krembung	38
85.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Krembung	35
86.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Krian	46
87.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Krian	40
88.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Krian	36
89.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Porong	43
90.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Porong	39
91.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Tarik	211
92.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Porong	31
93.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Sedati	44
94.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Sedati	43
95.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Sidoarjo	43
96.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Sidoarjo	41
97.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Sidoarjo	33
98.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 4 Sidoarjo	36
99.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 5 Sidoarjo	35
100.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 6 Sidoarjo	40





101.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Tulangan	234
102.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Sukodono	46
103.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Sukodono	43
104.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Taman	51
105.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Taman	46
106.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Taman	46
107.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Tanggulangin	39
108.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Tanggulangin	35
109.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Tarik	35
110.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Tarik	38
111.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Waru	351
112.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Waru	39
113.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Waru	37
114.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Waru	39
115.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 4 Waru	31
116.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Wonoayu	49
117.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Wonoayu	46
118.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri Prambon	41
119.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Tulangan	48
120.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri Satu Atap	0
121.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Wonoayu	232
122.	Uptd Anak Berkebutuhan Khusus	5
123.	Dinas Perhubungan	89
124.	Dinas Pangan Dan Pertanian	139
125.	Dinas Tenaga Kerja	36
126.	Rumah Sakit Umum Daerah	690
127.	Satuan Polisi Pamong Praja	104
128.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37
129.	Dinas Pppa Dan Kb	32
130.	Kecamatan Balongbendo	28
131.	Kecamatan Buduran	25
132.	Kecamatan Candi	28
133.	Kecamatan Gedangan	25
134.	Kecamatan Jabon	20
135.	Kecamatan Krembung	28
136.	Kecamatan Krian	25
137.	Kelurahan Kemasn Kec. Krian	4
138.	Kelurahan Krian Kec. Krian	3



139.	Kelurahan Tambakkemerakan Kec. Krian	3
140.	Kecamatan Porong	27
141.	Kelurahan Gedang Kec. Porong	6
142.	Kelurahan Jatirejo Kec. Porong	0
143.	Kelurahan Juwetkenongo Kec. Porong	4
144.	Kelurahan Mindi Kec. Porong	1
145.	Kelurahan Porong Kec. Porong	5
146.	Kelurahan Siring Kec. Porong	0
147.	Kecamatan Prambon	30
148.	Kecamatan Sedati	30
149.	Kecamatan Sidoarjo	30
150.	Kelurahan Bulusidokare Kec. Sidoarjo	4
151.	Kelurahan Celep Kec. Sidoarjo	6
152.	Kelurahan Cemengkalang Kec. Sidoarjo	7
153.	Kelurahan Gebang Kec. Sidoarjo	5
154.	Kelurahan Lemahputro Kec. Sidoarjo	5
155.	Kelurahan Magersari Kec. Sidoarjo	7
156.	Kelurahan Pekauman Kec. Sidoarjo	7
157.	Kelurahan Pucang Kec. Sidoarjo	6
158.	Kelurahan Pucanganom Kec. Sidoarjo	3
159.	Kelurahan Sekardangan Kec. Sidoarjo	5
160.	Kelurahan Sidokare Kec. Sidoarjo	5
161.	Kelurahan Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo	8
162.	Kelurahan Sidokumpul Kec. Sidoarjo	6
163.	Kelurahan Urangagung Kec. Sidoarjo	4
164.	Kecamatan Sukodono	24
165.	Kecamatan Taman	28
166.	Kelurahan Bebekan Kec. Taman	2
167.	Kelurahan Geluran Kec. Taman	5
168.	Kelurahan Kalijaten Kec. Taman	3
169.	Kelurahan Ketegan Kec. Taman	3
170.	Kelurahan Ngelom Kec. Taman	3
171.	Kelurahan Sepanjang Kec. Taman	5
172.	Kelurahan Taman Kec. Taman	4
173.	Kelurahan Wonocolo Kec. Taman	5
174.	Kecamatan Tanggulangin	29
175.	Kecamatan Tarik	28
176.	Kecamatan Tulangan	34
177.	Kecamatan Waru	29
178.	Kecamatan Wonoayu	28



179.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46
180.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	178
181.	<u>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</u>	37
182.	Dinas Sosial	33

## BAB III

### INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

#### 1. URUSAN PENDIDIKAN

		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	191,603	99.80%	Data Dapodikd asmen
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	191,984		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	95,881	99.16%	Data Dapodikd asmen
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	96,696		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	3,183	0.83%	website datadik.ke mendikbud.go.id
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	385,781		

## 2. URUSAN KESEHATAN

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
Urusan Wajib Kesehatan		3058	0.13			
	Rasio daya tampung RS Rujukan	2,282,215		Data jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		24	85.71			
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	28		Data jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		37529	96.06			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	39067		Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		35777	95.94			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	37291		Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		34903	98.28			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	35515		Data Cakupan kunjungan neotal menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		134,114	94.20			
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	142,365		Data Cakupan pelayanan kesehatan Balita kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		262272	84.98			
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	308611		Data Cakupan pelayanan kesehatan peserta didik, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, serta usia pendidikan dasar menurut kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		894610	57.18			
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1564584		Data Cakupan pelayanan kesehatan Usia Produktif kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		138413	74.09			
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	186826		Data Cakupan pelayanan kesehatan Usia lanjut usia menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile		
	237010	42.16				
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	562203		Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile		
	57713	78.46				
Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73559		Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile		
	4336	100.00				
Persentase orang tua yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4336		Data Cakupan pelayanan kesehatan Orang tua menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile		
	9088	33.98				
Persentase orang tua yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	26749		Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Tuberculosis menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile		
	27259	61.92				
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	44020		Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita HIV/AIDS menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile		

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
Urusan Wajib							
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	514	92.11	Belum disebutkan	AIR	bukti dukung berupa laporan kepala OPD
			558				
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten					
	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	2965	76.06	Buku pedoman RTTG	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan
			3898				
	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	796955	32.50	Belum Sesuai	belum ada	Data berupa rincian,
			2452199				
	5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	46940	1.91	Belum Sesuai	belum ada	Data berupa rincian, bukan nama
			2452199				
6	Rasio kepatuhan IMB kab./kota						
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kab./Kota	963.223	94.86	Rekapitulasi Kondisi Jalan Kab	Ada (hardcopy)	-	
		1015.416					
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	5	33.33	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung	
		15					
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	7	100%	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung	
		7					

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET	
			Elemen data	Capaian				
4	Urusan Wajib							
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten					
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten					
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	..	..	Belum Sesuai	belum ada	Data berupa rincian, bukan nama dokumen		
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	31.22	397	0.1%	Belum Sesuai	belum ada	Data berupa rincian, bukan nama dokumen	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	443,359		..				



## 5. URUSAN TRANTIBUM

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib							
	5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	600	100.00	Rekapitulasi Laporan / Nota Dinas Kegiatan	ada, hard copy	-
				600				
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	5	0.86	Jdih.sidoarjokab.go.id	ada, hard copy	-
				580				

## 6. URUSAN SOSIAL

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib Sosial							
6		62	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya	28019	67.80	DTKS Penetapan Oktober No. 146/HUK/2020	Ada, Soft dan Hard	-
				41,328		DTKS Penetapan Oktober No. 146/HUK/2020	Ada, Soft dan Hard	
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial	60,126	97.49	Belum Sesuai	belum ada	-
				61,677		Belum Sesuai	belum ada	

## 7. URUSAN TENAGA KERJA

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET	
			Elemen data	Capaian				
	Urusan Wajib							
7	Tenaga Kerja							
			13 keg					
		1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	21 keg	61.90	Dokumen RTK	da(Softcopy)	-
				301	80.91			
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	372		Data pelatihan tenaga kerja	Ada(Softcopy)	Softcopy tanpa stempel dari OPD
				..				
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,066,792		Belum disebutkan	Belum diberikan	Data menunggu data PDRB ADHK dan
				1902	62.94			
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	3022		Data WLKP	da(Softcopy)	Softcopy berupa rekap dari website
				1809	51.61			
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	3505		Data penempatan tenaga kerja	da(Softcopy)	Softcopy tanpa stempel dari OPD

### 8. URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	1,129,590,025,660	#VALUE!	Bappeda	Belum diberikan	
				..				
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	75	0.01	UPTD PPA	Belum diberikan	Jumlah Anak yang diambil sampai dengan
				599413				
		3	Kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 penduduk perempuan)	66	0.01	UPTD PPA	Belum diberikan	
				1,011,216				

### 9. URUSAN PANGAN

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	410,992.31 167,305.17	2.45	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun

## 10. URUSAN PERTANAHAN

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET	
			Elemen data	Capaian				
	Urusan Wajib							
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin.					
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum					
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.					
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform					
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.					
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui					

## 11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET	
			Elemen data	Capaian				
	Urusan Wajib							
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		<b>65.30</b>	Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	SOFT DAN HARD		
				37.60				
				40.50				
			21.90					
		Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	Dokumen LKPJ DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020	821.00	1224.00	Dokumen LKPJ DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020	SOFT DAN HARD	
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Nota Dinas Laporan Kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Tahun 2020	60.00	Nota Dinas Laporan Kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	SOFT DAN HARD	

## 12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib						
12	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	1,498,409	97.80		
			Persentase Penduduk Kepemilikan akta kelahiran	1,532,096			
		2	Persentase Penduduk Kepemilikan akta kelahiran	21,812	3.83		
			Jumlah OPD yang telah	569,879			
		3	Persentase Penduduk Kepemilikan akta kelahiran	508,718	89.25		
Jumlah OPD yang telah	569,997						
4	Persentase Penduduk Kepemilikan akta kelahiran	5	10.42				
	Jumlah OPD yang telah	48					

## 13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib						
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	0.00%	IDM	berupa rekapan Pengetasan Desa Tertinggal  rekapan supaya dittd oleh pimpinan dan stempel basah
				1			
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	0.00%	IDM	berupa rekapan Status Desa Mandiri  rekapan supaya dittd oleh pimpinan dan stempel basah
				212			

#### 14. URUSAN KELUARGA BERENCANA

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.978		dinkes dan bappeda	belum ada	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	266519	78.74	PA/PUS	Belum diberikan	
				338492				
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	82956	24.51	Unmeetned/ PUS	Belum diberikan			
338492								

### 15, USURAN PERHUBUNGAN

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib							
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten	0.4496		Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten					



## 16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib						
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses	48	100.00	PERDA NO 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah	Ada(Softcopy)	-
			48				
			7	20.00	7 Layanan Publik/Aplikasi yang terintegrasi 1. portal data kinerja; 2. DWH;3. BISPRO; 4. SINOP; 5. SIMPEG; 6. E BUDDY; 7. E-KINERJA		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	35		35 aplikasi : 1. Bos; 2. Aplikasi SIKSDA; 3. Aplikasi Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai; 4. Aplikasi database perusahaan Eksport import (INDAGO); 5. Aplikasi Lestari; 6. Antrian Sukodono; 7. Econsulting; 8. Aplikasi elabkd; 9. Aplikasi pengawasan; 10. SITABUR-KP; 11. Aplikasi SISDUR; 12. Aplikasi E-Kenda; 13. Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Pengangkutan Sampah (SIPPAS); 14. Aplikasi SIKD; 15. Aplikasi Laporan Bulanan Puskesmas; 16. Aplikasi Pendataan Penduduk Non Permanen Berbasis Web (LADEN); 17. Aplikasi Penerapan Sistem Informasi Road Inventory APILL Dishub; 18. Pengembangan Aplikasi Sipekat; 19. Sistem Informasi Manajemen Perangkat Desa; 20. Smart city; 21. Aplikasi DITAKOPUM; 22. Pengembangan Aplikasi Tuko; 23. Bahan Pokok / Siskaperbapo; 24. Aplikasi Toko Swalayan; 25. E-DAREN (dispenduk); 26. SIKS-SDA; 27. Mental baja (redirect); 28. DLHK Care (pengaduan dlhk); 29. Dekranasda; 30. Inlislite; 31. Aplikasi ekinerja; 32. Aplikasi ebuddy; 33. aplikasi sinop; 34. aplikasi datawarehouse; 35. aplikasi bispro	Ada(Softcopy)	Softcopy berupa rekap dari aplikasi
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	1,726,393	84.89			
			2,033,764		Data dari Dukcapil	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah

## 17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib							
17	Koperasi dan UKM	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	305	20.75%	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati
				1470				
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	2840	18.34%	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati
				15489				

#### 18. URUSAN PENANAMAN MODAL

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib							
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	7,037,752,693,895	-70.47	Data Realisasi Investasi BKPM RI	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD
				23,832,676,777,188				

#### 19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
	Urusan Wajib						
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	32	0.007%	e money disporapar	ada, soft copy
				467.180			
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	14.828	3.17%	e money disporapar	ada, soft copy
				467.180			
		3	Peningkatan prestasi olahraga	73		e money disporapar	ada, soft copy

## 20. URUSAN STATISTIK

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET		
			Elemen	Capaian					
	Urusan Wajib								
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	48	100.00	PERDA NO 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah	Ada(Softcopy)	-	
				48					
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	48	100.00		PERDA NO 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah	Ada(Softcopy)	-
				48					

## 21. URUSAN KEBUDAYAAN

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET	
			Elemen	Capaian				
22	Kebudayaan	121	Terlestarikannya Cagar Budaya	109	100.00	Tidak disebutkan	belum ada	-
				109				

## 22. URUSAN PERPUSTAKAAN

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET	
			Elemen data	Capaian				
	Urusan Wajib							
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		59.79	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					

### 23. URUSAN KEARSIPAN

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET	
			Elemen data	Capaian				
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	a = 26,74% l = 93,66% s = 106,54% j = 0	56.73	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	m = 274 b = 0 g = 0 a = 0 c = 0 i = 0	45.67			

### 24. URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET	
				Elemen data	Capaian				
	<b>Urusan Pilihan</b>								
25	Kelautan & perikanan	128	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	117.618.08	117618.08	Data statistik perikanan	berupa rekapan penangkapan di laut dan PUD (perairan Umum)	-

## 25. URUSAN PARIWISATA

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
	<b>Urusan Pilihan</b>							
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	5130-11727 11727	-56.25%	data kunjungan wisman/ Objek Wisata 2020	ada, soft dan hard	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	838942-1984673 1984673	-57.73%	data kunjungan wisman/ Objek Wisata 2020	ada, soft dan hard	
		3	Tingkat hunian akomodasi	483 2416	19.99%	data kunjungan wisman/ hotel 2020	ada, soft dan hard	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Nihil				Tanpa keterangan
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	466410810.00 4.422.599.399.218	0.01%	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung

## 26. URUSAN PERTANIAN

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
	<b>Urusan Pilihan</b>							
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	198.684.00 29435.00	6.75	Laporan mantri pertanian dan data rekapitulasi produksi, produktivitas dan	ada, soft copy	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(68-79) 79.00	-13.92%	laporan mantri	Belum diberikan	-

## 27. URUSAN KEHUTANAN

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
	<b>Urusan Pilihan</b>						
25	Kehutanan			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMILIKI HUTAN

## 28. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
	<b>Urusan Pilihan</b>						
25	ESDM			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMILIKI GAS BUMI

## 29. URUSAN PERDAGANGAN

	Urusan	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
					Elemen data	Capaian			
	<b>Urusan Pilihan</b>								
29	Perdagangan								
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan  Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kabupaten	.....,%	201	38.95%	OSS	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi  RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)	.....,%	17.874	94.09%	RDKK DAN REALISASI PENYALURAN	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
	3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan  Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten	.....,%	9.471	26.14%	Belum disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah

### 30. URUSAN PERINDUSTRIAN

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
30	<b>Urusan Pilihan</b> Perindustrian						
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	86 17.073	0.50%	DISPERINDAG	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Nihil		Belum disebutkan	Belum diberikan	Belum Disebutkan karena Nihil
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	86 86	100%	DISPERINDAG	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Nihil		Belum disebutkan	Belum diberikan	Belum Disebutkan karena Nihil
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	1 1	100%	DISPERINDAG	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
	6	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	-		Belum disebutkan	Belum diberikan	Belum Disebutkan karena Nihil

### 31, URUSAN TRANSMIGRASI

			IKK	Elemen data	Capaian	Sumber Data	dukungan	
	<b>Urusan Pilihan</b>							
25	TRANSMIG RASI				NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMEILIKI KAWASN TRANSMIGRASI

## INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

### 1. URUSAN PENDIDIKAN



	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>I</b>	<b>PENDIDIKAN</b>						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1) Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri & Swasta)		615	Belum Sesuai	belum ada	Data berupa rincian, bukan nama dokumen
		2) Jumlah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri & Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda		..			
		3) Jumlah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri & Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	15		Belum Sesuai	belum ada	Data berupa nama sub pelaksana, bukan nama dokumen
		4) Jumlah kebutuhan minimal Pendidik PAUD (Negeri & Swasta)	5.037		Belum Sesuai	belum ada	Data berupa rincian, bukan nama dokumen
		5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri & Swasta)		4.979	Belum Sesuai	belum ada	Data berupa rincian, bukan nama dokumen
		6) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD		3.770	Belum Sesuai	belum ada	Data berupa rincian, bukan nama dokumen

## 2. URUSAN KESEHATAN

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>2</b>	<b>II KESEHATAN</b>						
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1) Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	24	24	Data jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	28	28	Data jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Ada	Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Ada		Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada		Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Ada		Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada		Data Cakupan kunjungan neotal menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Ada		Data Cakupan kunjungan neotal menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada		Data Cakupan pelayanan kesehatan Balita kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	Ada, softfile	

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>3</b>	<b>III</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
1	Persentase/ Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	558		Belum Disebutkan	AIR	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	126.600		Belum Disebutkan	AIR	
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)					
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)					
		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada		Buku Pedoman RTTG	Belum Diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada		Buku Pedoman RTTG	Belum Diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	Kinerja	
					Indikator	Elemen data
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>					
<b>IV</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penangannannya 2) jumlah rumah yang terkena bencana alam 3) jumlah RT, KK, Jiwa Korban yang rumahnya terkena bencana alam 4) jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai rencana aksi 5) jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6) jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi				

## 5. URUSAN TRANTIBUM

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>					
5	<b>V</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
		Satpol PP					
	1)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum yang ditangani	600.00		Rekapitulasi Laporan / Nota Dinas Kegiatan	ada, hard copy
			Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.000		Laporan rekapitulasi data linmas	ada, hard copy
			Jumlah Sarana dan Prasarana	31 unit Mobil 108 Unit sepeda Motor		Laporan Validasi Barang Milik Daerah	ada, hard copy
			Jumlah Perda dan Perkada y	5 UU		Jdih.sidoarjokab.go.id	ada, hard copy
			Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6 Orang		Rekap Anggota PPNS (Sertifikasi terlampir)	ada, hard copy
			Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan	1 Paket		Arsip SOP OPD	ada, hard copy
	2)	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 UU 1 Tkt Provinsi 4 Tkt kabupaten		Jdih.sidoarjokab.go.id	ada, hard copy

## 6. URUSAN SOSIAL

		Urusan/IKK Outcome		IKK Output	RUMUS/ PERSAMAAN	SATUAN
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>1</b>	<b>I</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				
	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1)	Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri & Swasta)	-	Unit
			2)	Jumlah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri & Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari	-	Anak
			3)	Jumlah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri & Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	Anak
			4)	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik PAUD (Negeri & Swasta)	-	Orang
			5)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri & Swasta)	-	Orang
			6)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD	-	Orang

## 7. URUSAN TENAGA KERJA

		Urusan/IKK Outcome		IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>7</b>	<b>VII</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				
	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Dokumen
			2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga	Realisasi indikator - target indikator Realisasi	%
			3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	Perusahaan
	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1)	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jml penerapan prog. PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pd tahun n	%



## 8. URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Urusan		IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
				Elemen data	Capaian			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARK (Anggaran Responsif	1,129,590,025,660	#VALUE!	Bappeda	Belum diberikan	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang	75	0.01	UPTD PPA	Belum diberikan	Jumlah Anak yang diambil sampai dengan
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan	599413	0.01	UPTD PPA	Belum diberikan	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.978		dinkes dan bappeda	belum ada	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi	266519	78.74	PA/PUS	Belum diberikan	
		3	Persentase kebutuhan ber-	338492			Belum	

## 9. URUSAN PANGAN

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>IX</b>	<b>PANGAN</b>						
1)	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Ada			
		2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Ada			
		3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Tidak ada			
		4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Ada			
		5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada			
		6) Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Ada			
		7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Ada			
		8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		76 / 90	84.44%		

## 10. URUSAN PERTANAHAN

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>			
<b>X</b>	<b>PERTANAHAN</b>			
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1) SK Ijin Lokasi Yg diterbitkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah Ijin Lokasi Yg diberikan+ Jumlah surat penolakan permohonan ijin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	.....%
		2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah Penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee x 100 Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan Landreform	.....%
		3) SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Jumlah Luas Tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum absentee Jumlah Luas Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	.....%

## 11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>			
<b>XI</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	1) Hasil perhitungan terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan	ANGKA ANGKA ANGKA
2	2	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan sampah thdp vo. Timbulan sampah Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA thdp vol timbulan sampah % %

## 12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>I</b>	<b>PENDIDIKAN</b>						
<b>XII</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>						
1)	Perekaman KTP Elektronik	1) Penerbitan akta perkawinan 2) Penerbitan akta cerai 3) Penerbitan akta kematian 4) Penyajian data kependudukan	593,367 1,026,513 22,321 43,461 3,074 12 24	57.80 51.36 #DIV/0! 50.00	Tidak disebutkan Tidak disebutkan Tidak disebutkan Tidak disebutkan	Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada	
2)	Persentase Penduduk usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari Yang Memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	-					
3)	Kepemilikan akta kelahiran	-					
4)	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-					

## 13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>XIII</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa  2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya  3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan  4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0  0  322  0	    322	PIID-PEL  PIID-PEL  lembaga sosbud-adat desa  tidak ada	berupa rekapan tabel  berupa rekapan tabel  berupa rekapan tabel  tidak ada	untuk rekapan supaya di ttd oleh pimpinan dan stempel basah  untuk rekapan supaya di ttd oleh pimpinan dan stempel basah  untuk rekapan supaya di ttd oleh pimpinan dan stempel basah  tidak ada
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa  2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0  0	  0	PIID-PEL  PIID-PEL	Belum diberikan  Belum diberikan	untuk rekapan supaya di ttd oleh pimpinan dan stempel basah  untuk rekapan supaya di ttd oleh pimpinan dan stempel basah

#### 14. URUSAN KELURAGA BERENCANA

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	
			Elemen data	Capaian			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARK (Anggaran Responsif	1,129,590,025,660	#VALUE!	Bappeda	Belum diberikan
		2	Persentase anak korban kekerasan yang	75	0.01	UPTD PPA	Belum diberikan
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan	599413	0.01	UPTD PPA	Belum diberikan
				66			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.978		dinkes dan bappeda	belum ada
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi	266519	78.74	PA/PUS	Belum diberikan
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	338492	24.51	Unmeetneed/ PUS	Belum diberikan
				82956			

### 15, USURAN PERHUBUNGAN

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
15	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>					
	<b>XV</b>	<b>PERHUBUNGAN.</b>					
1	Rasio konektivitas Kabupaten	Persentase Tersedianya Fasilitas					
		1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	2	50.00	UPTD Terminal Tahun 2020	UPTD Terminal Tahun 2020	data dukung belum ada stempel dinas
			4				
		2) Terlaksananya pelayanan uji	44438	86.74	UPTD Pengujian Kendaraan	UPTD Pengujian Kendaraan	data dukung belum ada
3)	Penetapan tarif angkutan orang				Belum Disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan
					Belum Disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
2	VC Rasio di jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota					
		1)			Belum Disebutkan	Belum diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah

### 16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

		Urusan/IKK Outcome		IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
	A	URUSAN WAJIB				
16	XVI	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.</b>				
1	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jml perangkat daerah yg saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yg diamankan yg disediakan oleh Dinas Kominfo	.....%
					Jumlah Perangkat Daerah	
			2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jml perangkat daerah menggunakan akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	.....%
					Jumlah Perangkat Daerah	
			3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dg memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik intra pemerintah yang disediakan dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada/tidak
2	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1)	Persentase kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dg	Jml kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dg Permen Kominfo No.5 Tahun 2015	.....%

### 17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	Urusan/IKK Outcome		IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>			
	<b>XVII</b>	<b>KOPERASI DAN UKM</b>			
17	1	<b>Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</b>	1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah Kabupaten/Kota  2) Persentase fasilitasi penertiban Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dala daerah kabupaten/kota  3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang <del>dilaporkan</del> Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam  Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang <del>dilaporkan</del> Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang <del>dilaporkan</del>  Jumlah Koperasi yang diperiksa dan <del>diawasi</del> Jumlah Koperasi yang ada	.....%  .....%

### 18. URUSAN PENANAMAN MODAL

	Urusan/IKK Outcome		IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SA
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>			
	<b>XVIII</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
18	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	PERDA mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif penanaman modal yang menadi kewenangan daerah kabupaten/kota 1)	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	
			2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	
			3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal Per Tahun	
			4) Kegiatan Semoinar, Bisnis, Forum One on One Meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	
			5) Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	
			6) Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	

## 19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



	A	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Elemen data	Capaian			
	<b>XIX</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						
19	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan wirausaha	200				
			2) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan wirausaha	0				
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	18				
			2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0				
	3	Peningkatan prestasi olahraga	1) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40				
			2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3 even 1. Kejurkab 2. PORSD 3. PORSMP				

## 20. URUSAN STATISTIK

		Urusan/IKK Outcome	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>			
<b>16</b>	<b>XVI</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.</b>			
1	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jml perangkat daerah yg saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yg diamankan yg disediakan oleh Dinas Kominfo	.....%
				Jumlah Perangkat Daerah	
			2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jml perangkat daerah menggunakan akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	.....%
				Jumlah Perangkat Daerah	
			3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dg memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik intra pemerintah yang disediakan dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada/tidak
2	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1) Persentase kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dg	Jml kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dg Permen Kominfo No.5 Tahun 2015	.....%

## 21. URUSAN KEBUDAYAAN

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
<b>XXII</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya						
		1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	113/109x100%	1.36			
		2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	-	-			
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dikembangkan	1 candi pari	1.00			
		4) Jumlah SDM ,lembaga dan pranata yg dibina	1/..	1.00			
		5) Register caga budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	113				
		6) Perlindungan cagar buda kabu[atan]	-	-			
		7) Layanan [erizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	-			
		8) Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian ..)	-	-			
		9) Pemanfaatan cagar budaya provinsi	-	-			
		10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	-			
		11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	-	-			
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	-	-			
		12) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	-			
		13) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6	6.00			
		14) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	-			
		15) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	-			
		16) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	-			
		17) Peningkatan kompetensi SDM cagar Budaya dan permuseuman	-	-			
		18) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-	-			
		19) Penyelenggaraan kegiatan museum yg melibatkan masyarakat	1	1.00			

## 22. URUSAN PERPUSTAKAAN

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN	
			Elemen data	Capaian				
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>						
23	<b>XXIII</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>						
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1) Ratio ketercukupan koleksi 2) Persentase kemanfaatan 3) Ratio ketercukupan tenaga 4) Persentase perpustakaan	2.346.150 2.033.764 5.752.572 2.033.764 866 2.033.764 111 944	115.36 282.85 0.04 11.76	rekap data perpustakaan rekap data perpustakaan rekap data perpustakaan rekap data perpustakaan	Belum Diberikan Belum Diberikan Belum Diberikan Belum Diberikan	bukti dukung berupa laporan bukti dukung berupa laporan bukti dukung berupa laporan bukti dukung berupa laporan
			5) Jumlah pemakatan gemar membaca dimasyarakat		5	rekap data perpustakaan dan data dari dispendukcapil	Belum Diberikan	bukti dukung berupa laporan
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		5	Cover Buku Terlampir	Belum Diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah
			2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan alih bahasa		-	NIHIL	-	tidak ada alih aksara dan alih bahasa karena naskah tersebut telah tertulis dalam bahasa Indonesia
			3) Koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya		545	Cover Buku Terlampir	Belum Diberikan	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah

## 23. URUSAN KEARSIPAN

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Elemen data	Capaian			
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>					
24	<b>XXIV</b>	<b>KEARSIPAN</b>					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	1337	26.74		Belum Diberikan
				5000			
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan	1405	93.66667		Belum Diberikan
				1500			
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan	3729	106.5429		Belum Diberikan
				3500			
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	#DIV/0!		
				0			
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		274		Belum Diberikan
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		0	NIHIL	- Tidak ada anggaran
		3	Penyelamatan arsip perangat daerah Kab/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di Provinsi		0	NIHIL	- Tidak ada anggaran
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK		0	NIHIL	- Tidak ada anggaran
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		0	NIHIL	- Tidak ada anggaran
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		0	NIHIL	- Tidak ada anggaran

## 24. URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN

		Urusan/IKK Outcome		IKK Output	RUMUS/ PERSAMAAN	SATUAN
		<b>Urusan Pilihan</b>				
	<b>XXV</b>	<b>Kelautan &amp; perikanan</b>				
25	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	1	Jumlah Rumah Tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	Jumlah Rumah Tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	
			2	Prosentasi TPI yang Operasional	Jumlah TPI yg Operasional	%
			3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	ijin
			4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	orang
			5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang dioroduksi per tahun	benih

## 25. URUSAN PARIWISATA



	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	RUMUS/ PERSAMAAN	SATUAN	Kinerja		SUMBER DATA	DATA DUKUNG	KETERANGAN	
					Elemen data	Capaian				
	<b>Usuran Pilihan</b>									
	<b>XXVI PARIWISATA</b>				.....%					
26	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi			35	35			
			2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			89.00	89			
			3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota			19.00	19			
			4) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			5130.00	5130			
			5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			4 even	4 even			
			6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota			Nihil	Nihil			
			7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			Nihil	Nihil			
			8) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata terverifikasi		40.00	8.55			
				Jumlah tenaga kerja pariwisata		468.00				
			9) Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor pariwisata		80	17.09%			
	Jumlah sasaran pembekalan sektor pariwisata		468							
	10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				Nihil					
	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	-			.....%				
	3	Tingkat hunian akomodasi	-							
	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-			.....%				
	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-							

## 26. URUSAN PERTANIAN

		Urusan/IKK Outcome		IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
	<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
	<b>IX</b>	<b>PANGAN</b>				
9	1)	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	1)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak ada infrastruktur pergudangan	lumbung
			2)	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan	kegiatan
			3)	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Regulasi
			4)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	kegiatan
			5)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	peta
			6)	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	kegiatan

## 27. URUSAN KEHUTANAN

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
	<b>Urusan Pilihan</b>						
25	Kehutanan			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMILIKI HUTAN

## 28. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

	Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
			Elemen data	Capaian			
	<b>Urusan Pilihan</b>						
25	ESDM			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMEILIKI GAS BUMI

## 29. URUSAN PERDAGANGAN

	Urusan/IKK Outcome		IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
	<b>Urusan Pilihan</b>				
<b>XXIX</b>	<b>PERDAGANGAN</b>				.....%
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :		
		a. Pusat perbelanjaan		Jumlah izin Pusat perbelanjaan yang diterbitkan < 5 hari kerja	
				Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	
		b. Toko swalayan		Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan < 5 hari kerja	
				Jumlah permohonan Ijin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	
		2)	Persentase penerbitan	Jumlah Penerbitan TGD <	

### 30. URUSAN PERINDUSTRIAN

	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN
	<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>XXIX</b>	<b>PERDAGANGAN</b>			.....%
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin Pusat perbelanjaan yang diterbitkan < 5 hari kerja  Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar  Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan < 5 hari kerja  Jumlah permohonan ljin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	
		2) Persentase penerbitan	Jumlah Penerbitan TGD <	

### 31, URUSAN TRANSMIGRASI

	IKK	Elemen data	Capaian	Sumber Data	Dukungan	
	<b>Urusan Pilihan</b>					
25	TRANSMIGRASI		NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMILIKI KAWASAN TRANSMIGRASI

### INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

#### 1. URUSAN PEMERINTAHAN( PERENCANAAN & KEUANGAN)

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	
		Elemen data	Capaian			
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
Perencanaan & Keuangan	3	1	Persentase Belanja	412.892.223.269,61	7.97%	
				5.182.074.462.157,57		
	4	2	Persentase PAD	1.809.832.261.491,15		Belum disebutkan
				belum ada data		
	5	3	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	3.922.420.498.995,18- 1.062.436.946.290,33	0,00%	RRA
				4.44167E+12		
6	4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,09		

## 2. URUSAN PEMERINTAHAN ( PENGADAAN)

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek	0	0,00	Data Base LPSE (ISB)	Berupa softcopy
			164			
	2	Persentase jumlah pengadaan yang	310	20,42	Data Base LPSE (ISB)	Berupa softcopy
			1518			
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan	512.295.930.647	19,99	Data Base LPSE (ISB)	Berupa softcopy
			2.562.349.662.607			

## 3. URUSAN PEMERINTAHAN ( KEPEGAWAIAN)

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1777	87,07%		Data Aplikasi Database
			2041			
	2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	373	9,51%		Rekapitulasi Data
			3921			
	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru)	373	100,00%		Rekapitulasi Data
			373			

## 4. URUSAN PEMERINTAHAN ( MANAJEMEN KEUANGAN)

	Urusan			IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	SATUAN
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
	Manajmen Keuangan	13	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu	,,,,,,,,,,%
			2	Deviasi realisasi PAD		,,,,,,,,,,%
		3		Assets management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	
					Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	
					Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	

#### 5. URUSAN PEMERINTAHAN ( TRANSPARANSI & PARTISIPASI PUBLIK)

	Urusan			IKK	Kinerja	
					Elemen data	Capaian
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
	Transparansi & Partisipasi Publik	16	1	Informasi tentang	belum ada data	
					belum ada data	
		17	2	Akses publik terhadap	6	50.00%
					12	

## PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND).

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

### **A. Bidang Urusan Pendidikan**

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

#### **2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
----	-----------------	---------------	----------------	---------------------



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	2020
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan	100%	2020
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan PAUD	100%	2020

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	158.538	158.538	100%	Jumlah Warga Kabupaten/Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) _____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	117	177	100%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan _____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabu		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.766	58.766	100%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
		patenUsia 5-6TahunYangberpartisipasidalampen didikan PAUD						pendidikan PAUD JumlahWargaKabupatenUsia 5-6Tahun

#### 4. Sarana Dan Prasarana Bidang Pendidikan Serta Personil

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH KELAS	JUMLAH MURID	TENAGA PENGAJAR	KETERANGAN
1	Sekolah Dasar Negeri	466	4.549	118.361	5.892	
2	Sekolah Dasar Swasta Dan Sederajat	117	1.348	34.026	1.891	
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri	46	2.643	40.228	1.256	
4	Sekolah Menengah Pertama Swasta	132	1.284	36.760	1.975	
5	Sekolah Paud Negeri	2	11	272	16	
6	Sekolah Paud Swasta	746	2.500	43.443	2.181	

#### 5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapannya pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

No	Jenis Pelayanan	Pagu Anggaran
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		PAGU
1	Pengadaan perlengkapan PAUD	62.692.500
2	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	39.767.400.000
3	Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD	39.767.400.000
4	Pengadaan alat peraga praktik dan peraga siswa PAUD	39.767.400.000
5	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	39.767.400.000
6	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	27.557.592.460
7	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	27.557.592.460
8	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	221.616.640

9	Perhitungan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan	3.55
10	Pembangunan Gedung/tuangkelas/ ruang guru PAUD	385.000.00
<b>Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>		PAGU
1	Pengadaanperlengkapansekolah	130.000.00
2	Pengadaanperlengkapansiswa	130.000.00
3	Pengadaanalatperagapraktik dan peragasiswa	130.000.00
4	Penyediaanbiayapersonilpesertadidiksekolahdasar	1.300.000.00
5	Penyediaanpendidik dan tenagakependidikanbagisatuanpendidikansekolahdasar	90.958.98
6	Pengembangankarirpendidik dan tenagakependidikan pada satuanpendidikansekolahdasar	125.350.274.29
7	Penghitungan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan satuan Pendidikan dasar	5.715.967.86
8	Pembinaankelembagaan dan manajemenPendidikan dasar	1.050.778.56
9	Pembangunan unit sekolahbaru (USB)	28.092.350.60
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	28.092.350.60
11	Rehabilitasisedang/beratruangkelas	44.842.125.68
12	Pengelolaanmanajemen data pendidikan	5.715.967.86
13	Penyediaanbeasiswauntukanak miskin	700.000.00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		PAGU
1	PenyediaanBiayaPersonilPesertaDidikSekolahMenengahPertama	130.000.00
2	Perlengkapan Dasar Buku Teks PesertaDidik	130.000.00
3	PerlengkapanBelajarPesertaDidik	130.000.00
4	PengadaanPerlengkapanSiswa	1.300.000.00
5	Pengadaan Alat Prattik dan PeragaSiswa	90.958.98
6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan UjianbagiPesertaDidik	125.350.274.29
7	PenyediaanPendidik dan Tenaga KependidikanbagiSatuan Pendidikan SekolahMenengahPertama	5.715.967.86
8	Pengembangankarirpendidik dan tenagakependidikan pada satuan Pendidikan SekolahMenengahPertama	1.050.778.56
9	Pembinaankelembagaan dan manajemensekolah	28.092.350.60
10	Penghitungan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan satuan Pendidikan menengah	28.092.350.60
11	Pembangunan unit sekolahbaru (USB)	44.842.125.68

12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.715.967.86
13	Rehabilitasisedang/beratruangkelas	44.842.125.68
14	Pengelolaanmanajemen data pendidikan	1.045.379.52
15	Penyediaanbeasiswauntukanak miskin	700.000.00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolahmenengahpertama</b>		<b>PAG</b>
1	PenyediaanBiayaPersonilpesertadidik non formal/ kesetaraan	130.000.00
2	Pengadaan Alat Prattik dan Peragasiswapesertadidik non formal/ kesetaraan	130.000.00
3	Penyelenggaraan Proses Belajarsiswapesertadidik non formal/ kesetaraan	130.000.00
4	PenyediaanPendidik dan Tenaga KependidikanbagibagiSatuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	1.300.000.00
5	Pengembangankarirpendidik dan tenagakependidikan pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	90.958.98
6	Pembinaankelembagaan dan manajemen pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	125.350.274.29
7	Penghitungan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	5.715.967.86
8	Pembangunan Gedung/ruangkelas/ruang guru non formal/kesetaraan	1.050.778.56
9	Rehabilitasisedang/berat Gedung/ruangkelas/ruang guru non formal/kesetaraan	28.092.350.60
10	Pemeliharaanrutin Gedung/ruangkelas/ruang guru non formal/kesetaraan	28.092.350.60
11	Pengadaanperlengkapan Pendidikan non formal/kesetaraan	44.842.125.68
12	Pengelolaanmenejemen data pendidikan	5.715.967.86
13	Penyediaanbeasiswauntukanak miskin	700.000.00

### 3. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antaralain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan	Dukungan Personil
1	Pendidikan Dasar	27 PNS dan 5 NON PNS
2	Pendidikan Kesetaraan	2 PNS dan 7 NON PNS
3	Pendidikan Anak Usia Dini	13 PNS dan 0. NON PNS

#### 4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antara lain :

1. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah, jenjang dan jenis Pendidikan dalam pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar secara daring di era pandemic Covid-19
2. Belum tercapainya peningkatan mutu pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, ditandai belum tercapainya indikator-indikator keberhasilan pada masing-masing jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
3. Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi syarat golongan, kualifikasi, kompetensi dalam melakukan tugas layanan pendidikan
4. Budaya peserta didik dalam mengerjakan soal yang berbasis komputer/ daring belum terbiasa dan kesiapan sarana prasarana sekolah pada tingkat satuan pendidikan belum memadai
5. Implementasi kurikulum 2013

Adapun solusi yang diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan antara lain :

1. Akan diberlakukan pengawasan dan evaluasi tentang peraturan daerah/Perbup untuk Zonasi saat PPDB sehingga meminimalisir membengkaknya pendaftaran peserta didik baru di satu sekolah.
  
- b. Memberikan sosialisasi kepada sekolah/satuan Pendidikan tentang standard sarana prasarana untuk memberikan rekomendasi pembelian Sarpras yang sesuai dengan Standard yang telah ditentukan.
  
- c. Melakukan pengadaan komputer dan laptop untuk kesiapan sarana prasarana pelaksanaan pembelajaran secara daring pada tingkat satuan pendidikan belum memadai
  
- d. Pengadaan Alat Peraga di dalam kelas untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana cara membua alat peraga sesuai usia anak dan mudah digunakan. Memberikan pendampingan dan masukan kepada pengurus KKG melalui pengawas, agar dalam pelaksanaan KKG ataupun PKB harus mencari materi yang tepat dan dibutuhkan oleh guru saat pelaksanaannya. Untuk Pemerintah Kabupaten/Dinas Pendidikan akan meninjau ulang tentang Juknis BOSDA agar pro SPM di satuan Pendidikan dengan memasukkan peraturan tentang pengadaan Alat peraga untuk mendukung mutu pembelajaran.

## **B. Bidang Urusan Kesehatan**



Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Kesehatan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV

### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	39.067	2020
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	37.291	2020
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	35.515	2020
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	142.365	2020
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	308	2020
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	1.564.584	2020
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	186.826	2020
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	562.203	2020
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	73.559	2020
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	4.336	2020

<b>No</b>	<b>Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator SPM</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	26.749	2020
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resikoterinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resikoterinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	44.020	2020

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	39.067	37.529	96,06%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	37.291	35.777	95,94%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	35.515	34.903	98,28%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	142.365	134.114	94,20%	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	308	262.272	85,98%	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	1.564.584	894.610	57,18%	Jumlah pengunjung usia 15 tahun ke atas mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	186.826	138.413	74,09%	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	562.203	237.010	42,16%	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	73.559	57.713	78,46%	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	4.336	4.336	100%	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerjab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	≥ 80%	Dinas Kesehatan	26.749	9.088	33,98%	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	44.020	27.259	61,92%	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama

#### 4. Sarana Dan Prasarana Kesehatan

<b>NO</b>	<b>JENIS FASILITAS KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>JUMLAH KAMAR RAWAT INAP</b>	<b>JUMLAH DOKTER UMUM/BIDAN</b>	<b>JUMLAH DOKTER SPESIALIS</b>	<b>JUMLAH PERAWAT</b>	<b>JUMLAH APOTEKER</b>	<b>JUMLAH TENAGA UMUM/ADMIN</b>
<b>1</b>	Rsud Kab Sidoarjo							
<b>2</b>	Puskesmas							
<b>3</b>	Klinik Kesehatan Swasta Rawat Inap							
<b>4</b>	Klinik Kesehatan Swasta Tanpa Rawat Inap							
<b>5</b>	Klinik Bidan Bersalin							

## 5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Alokasi Dana
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
2	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
7	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
8	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Alokasi Dana
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	

## 6. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antaralain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Dukungan Personil
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV	

## 7. Permasalahan dan Solusi

1. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 57,18%. Ini disebabkan karena adanya pandemi, sehingga aktifitas posbindu, yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19, ditiadakan.
2. Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 79,80%. Ini dikarenakan warga dengan usia 60 tahun ke atas sangat berisiko dan rentan terhadap covid, dan kebanyakan juga komorbid, maka semua kegiatan lansia ditiadakan. Pelayanan juga dilakukan melalui telepon.
3. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 42,16%. Sama seperti pencapaian indikator usia produktif mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, karena adanya pandemi, sehingga aktifitas posbindu, yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19, ditiadakan.
4. Persentase penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 78,46%. Sama seperti pencapaian indikator usia produktif dan penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, karena adanya pandemi, sehingga aktifitas posbindu, yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19, ditiadakan.
5. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 33,98%. Ini dikarenakan :
  - Pandemi covid menyebabkan petugas kesulitan kontak tracing (penemuan/ pelacak kontak dengan pasien terduga TB).
  - Pemeriks cenderung mensuspektkan covid bukan TB, karena gejala yang mirip.

- Orang terduga TB takut berobat ke fasilitas kesehatan karena takut didiagnosa COVID-19.
- 6. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 61,92%. Ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan petugas kesulitan tracing (penemuan/pelacakan kasus).

### **C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM di bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

#### **2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<b>2.452.199</b>	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		2020

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	PDAM Sidoarjo dan P2CKTR	2.452.199	796.955	32,5 %	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari <u>Seluruh warga kabupaten</u>
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Bina marga, dan Sumber Daya Air				Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik <u>Seluruh warga kabupaten</u>

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Rp. 2.381.220.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Rp. 990.783.700

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil	KET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	4 PNS dan 2 NON PNS	P2CKTR
		613 NON PNS	PDAM
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2 PNS dan 12 NON PNS	P2CKTR

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain :

1. Tingkat cakupan dan pertumbuhan pelanggan baru yang rendah dan tingkat konsumsi yang rendah, kualitas air baku pada wilayah tertentu kualitasnya kurang baik.
2. Jumlah rumah/bangunan (KK) yang mendapatkan pelayanan pengolahan lumpur tinja masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah/bangunan (KK) di Sidoarjo. Hal ini karena kapasitas IPLT, jumlah SDM dan jumlah sarana pengangkutan yang dimiliki UPTD PALD masih belum mencukupi. Oleh karena itu target peningkatan pelayanan disesuaikan dengan kapasitas maksimum IPLT. Dan pada tahun 2019, jumlah rumah/bangunan yang mendapatkan pelayanan sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
  - a. Data layanan SPAM Pedesaan belum terdata dalam RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum).
  - b. Data Lokasi Prioritas Layanan SPALD-S/ SPALD-T belum terdata dalam SSK (Strategi Sanitasi Kota).
2. Penghitungan Kebutuhan
  - a. Area layanan dalam RISPAM dan SSK belum terinci.
3. Perencanaan dan Anggaran
  - a. Pagu anggaran belum sesuai dengan kebutuhan layanan.
4. Pelaksanaan
  - a. Layanan air bersih dan sanitasi yang terbangun belum memenuhi target SPM.

## **D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat Antara Lain :

<b>No</b>	<b>Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat</b>
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program pemerintah kabupaten

### **2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

<b>No</b>	<b>Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator SPM</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkenarelokasi akibat program Pemerintah Daerah		



<b>No</b>	<b>Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator SPM</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
		kabupaten yang memperolehfasilitasi penyediaanrumah yang layakhuni		

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	BPBD				Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni  Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten korban bencana
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenai relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkenai relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%					Jumlah Warga Kabupaten yang terkenai relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni  Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkenai relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten



#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat Antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	

## **6. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

1. Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal
2. Data rumah masyarakat yang terkenai relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkenai relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1. Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkenai relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD
2. Memasukkan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkenai relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

## **E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota .

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM di bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

<b>No</b>	<b>Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketertarikan dan ketertarikan Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	600	2020
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.452.199	2020
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.452.199	2020
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		2020
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran		2020

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan ketertaman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satpol PP Kab. Sidoarjo	600	600	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkenai penegakan hukum Perda dan perkara
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.452.199		20,9%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Kabupaten di wilayah rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.452.199		0.1%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Kabupaten di wilayah



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
		encana						rawan bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	100%	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang) Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang)
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	453	453	100%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dampak kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dengan menggunakan skala kabupaten/kota yang seharusnya diselamatkan dan dievakuasi menggunakan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamat lengkap (Orang)

Jumlah korban menerima jaminan sosial tanggap darurat pasca

Jumlah korban seharusnya diselamatkan dan dievakuasi menggunakan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamat pasca

Dari hasil perhitungan, bahwa indikator jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) memiliki nilai capaian paling rendah yaitu, 22,4%, hal ini diasumsikan Wilayah Manajemen Kebakaran adalah 18 Kecamatan dengan jumlah unit pemadam kebakaran sebanyak 4 kendaraan.

#### **4. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

<b>No</b>	<b>Pelayanan Dasar</b>	<b>Alokasi Dana</b>
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

#### **5. Dukungan Personil**

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antar lain :

No	<b>Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Dukungan Personil</b>
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	62 PNS, 185 NON PNS

## **6. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

## **F. Bidang Urusan Sosial**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tunas sosial khusus nyagelandang andan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	7.359	2020
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	3.390	2019

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjutan terluar Pant	Jumlah Warga Kabupaten lanjutan yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	30.358	2019
4	Rehabilitasi sosial dasar tunasosial khusnya gelandangan dan pengemis diluar Pant	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	221	2019
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pascabencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	60.115	2019

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2019			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	7.359	5.932	80.61%	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah keseluruhan warga kabupaten penyandang disabilitas di luar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	3.390	3.390	100%	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah keseluruhan anak terlantar di luar panti
3	Rehabilitasi sosial lanjutan terlar di luar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten lanjutan terlar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	30.358	20.314	66.91%	Jumlah Warga Kabupaten lanjutan terlar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Kabupaten lanjutan terlar di luar panti
4	Rehabilitasi sosial khusus nyagel	Persentase (%) Warga Kabupaten yang gelandangan	100%	Dinas Sosial	221	221	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2019			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
	andangandanp engemis diluar Panti	danpengemis yangmemp erolehrehabilitasisociald asartuna socialdiluarpanti						<u>socialdiluarpanti</u> JumlahWargaKabupaten yang gelandangan danpengemisdiluarpanti
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap p&pasca bencana nabagikorban bencana	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	Dinas Sosial	60.115	60.115	100%	Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca <u>Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca</u>



#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial Antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Alokasi Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	68.026.800
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	74.528.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar Panti	1.923.293.200
4	Rehabilitasi sosial dasar tunas sosial khusus yang gelandang dan pengemis diluar Panti	153.226.240
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	4.713.482.500

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :





No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	35 PNS Dan 33 NON PNS
2	Rehabilitasi sosial dasar terlantar diluar Panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tunas sosial khususny agelandangandan pengemis diluar Panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	
6.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	
	b. Penyediaan sarana prasarana panti sosial kalakabupaten/kota	
	c. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti kalakabupaten/kota	

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain :



## **BAB 3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.



### **Program SKPD**

Program SKPD merupakan program sektoral yang menjangkau tanggung jawab langsung di teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih mudah khususnyadi dalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program SKPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

### **Program Lintas SKPD**

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta tahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontraproduktif dengan program yang dilakukan. Program lintas SKPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan manajemen SKPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Contohnya seperti program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Dimana program lintas SKPD ini membutuhkan koordinasi dari beberapa Dinas terkait seperti Disporabudpar dan Dinsosnaker. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas SKPD. Untuk aspek perwilayahan, program – program



lintassektoral (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program SKPD. Untuk itu, kerjasama antara daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Adapun program kegiatan per bidang yang dilakukan antara lain :

**A. Program Kegiatan SPM Bidang Pendidikan**

Adapun program kegiatan tahun 2019 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No.	Pelayanan Dasar	Program Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Evaluasi Sekolah SD/MI/SMP/MTs</li><li>2. Pengembangan sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (DAK).SD/SMP</li><li>3. Pembinaan dan Penyelenggaraan teknis SD/SMP</li><li>4. Pendampingan dan Penyelenggaraan sarana prasarana sekolah.SD/SMP/MI/MTs</li><li>5. Pengembangan sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Non DAK)</li><li>6. Penyelenggaraan akreditasi pendidikan sekolah dasar.</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Fasilitas Implementasi kurikulum SD/SMP</li><li>8. Penyelenggaraan Pelayanan perijinan bidang pendidikan SD/SMP</li><li>9. Pemberian Dana BPP (Biaya Personal Pendidikan ) SD/MI/SMP/MTs</li></ol>
2	Pendidikan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan Masyarakat.</li><li>2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.</li><li>3. Penyelenggaraan dan Operasional UPT SKB.</li><li>4. Penyelenggaraan perijinan lembaga pendidikan masyarakat.</li><li>5. Pemberian Biaya Operasional Pendamping (BOP) Kesetaraan</li></ol>
3	Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan Penyelenggaraan PAUD/TK</li><li>2. Penyelenggaraan perizinan lembaga PAUD/TK.</li><li>3. Pengembangan sarana dan Prasarana</li><li>4. Pemberian Biaya Operasional</li></ol>



	Pendamping (BOP) PAUD
--	-----------------------

### **B. Program Kegiatan SPM Bidang Kesehatan**

Adapun program kegiatan tahun 2019 yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SPM antara lain :

<b>No</b>	<b>Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan</b>	<b>Program</b>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pencegahan & Pengendalian Penyakit



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Program
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pencegahan & Pengendalian Penyakit

### C. Program Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Adapun program kegiatan tahun 2019 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Program Kegiatan	Ket
----	--	------------------	-----



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Program Kegiatan	Ket
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Program Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Sanitasi Air Bersih	P2CKTR
		Pemasangan Tambahan Sambungan Baru sebanyak 4.289 SR	Program PDAM
		Pembangunan distributor center air Umbulan II di DC Jabon, DC Candi dan DC Sidoarjo	
		Pemasangan Jaringan distribusi Umbulan II	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Program Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Perumahan	

#### D. Program Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Adapun program kegiatan tahun 2019 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antaralain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Program
1	Penyediaan Rehabilitasi Rumah dan yang	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana





	layakhunibagi bencanakabupaten	korban	Penyiapan sumberdaya untuk rehabilitasi pascabencana Pelaksanaan rehabilitasi pascabencana Penyusunan laporan pascabencana Koordinasi pemulihan pascabencana Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program pemerintah kabupaten		Monev penyediaan prasarana permukiman Pembangunan sarana dan prasarana permukiman (termasuk DAK, RSH, pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dan kampung nelayan) Pemeliharaan prasarana permukiman Rehab rumah tidak layak huni Monev penyediaan prasarana perumahan Operasional pelayanan pemakaman Operasional pengelolaan rusunawa Pembangunan/peningkatan sarana, prasarana dan utilitas perumahan Pembinaan tata lingkungan perumahan Perencanaan teknis prasarana perumahan Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

#### **E. Program Kegiatan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Adapun program kegiatan tahun 2019 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :



No	Pelayanan Dasar	Program
1	Pelayanan ketertarikan dan ketertiban Umum	Program pembinaan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat
		Program pembinaan operasional, pengembangan dan pengendalian perlindungan masyarakat
		Program pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan
		Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

#### **F. Program Kegiatan SPM Bidang Sosial**

Adapun program kegiatan tahun 2019 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Program
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar antelantar diluar Panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjutan terlantar diluar Panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tunasoci al khusus nyagelandang andan pengemis diluar Panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	2. Penyediaan sarana prasarana sosial skala kabupaten/kota	
	3. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	LPPD		SUMBER DATA
				Capaian	Perubahan	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020	80.29	0.30	BPS
			Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019	80.05		
2	Angka Kemiskinan	Laju pertumbuhan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan Tahun 2020	5.59	5.08	BPS
			Angka Kemiskinan Tahun 2019	5.32		
3	Angka Pengangguran	Laju pertumbuhan Angka Pengangguran	Angka Pengangguran Tahun 2020	10.97	132.42	BPS
			Angka Pengangguran Tahun 2019	4.72		
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020	(3.69)	-161.60	BPS
			Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019	5.99		
5	Pendapatan Per kapita	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per Kapita Tahun 2020	86.425	-4.71	BPS
			Pendapatan Per Kapita Tahun 2019	90.697		
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju pertumbuhan Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020		tdi	DIRILIS BPS PADA BULAN DESEMBER 2021
			Ketimpangan Pendapatan Tahun 2019	0.31		



1. IPM

Dari segi sumberdaya manusia Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo terus meningkat selama lima tahun terakhir. Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 2.28 juta memiliki IPM sebesar 78.17 di tahun 2017 meningkat yang meningkat menjadi 80.29 di tahun 2020. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten/kota dengan IPM tertinggi peringkat 4 di Propinsi Jawa Timur.

2. Angka Kemiskinan
3. Pengangguran
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Pendapatan per Kapita
6. Ketimpangan Pendapatan



## **BAB IV**

### **HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD)**

#### **A. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

##### **Status Kinerja LPPD**

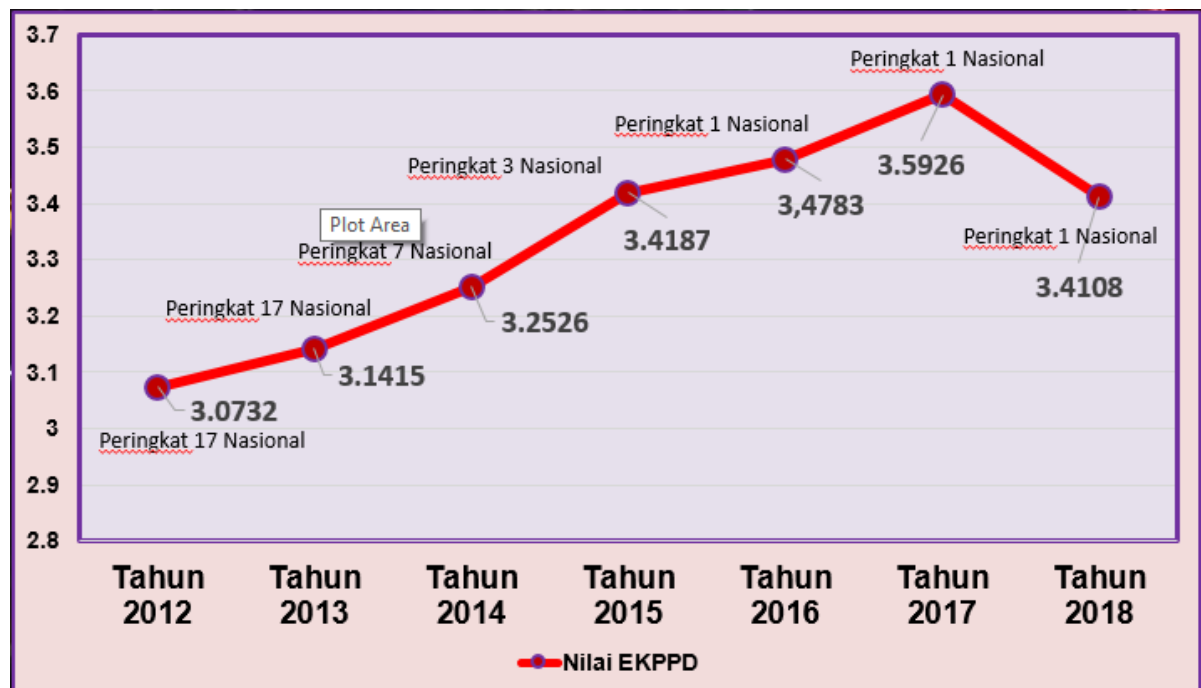
Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 memperoleh nilai (score) 3,4108 dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan bertahan mendapat peringkat ke-1 (**pertama**) tingkat Nasional dan berhasil meraih predikat bintang 4 (empat) kinerja terbaik. Kabupaten Sidoarjo sudah pernah mendapatkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI tahun 2017 yang diselenggarakan di Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo, serta Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tahun 2015. Sehubungan dengan telah berhasilnya Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan tersebut, maka Kabupaten Sidoarjo harus tetap dapat mempertahankan prestasi kebangganya.



Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

**Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo**



Sumber Data : Hasil EKPPD Kementerian Dalam Negeri



Upaya yang dilakukan adalah membuat kebijakan satu OPD satu Inovasi, sehingga kinerja OPD menjadi sangat tinggi dan memiliki nilai lebih.

Selain juga menjaga tren Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo.

### **Opini Atas Audit BPK**

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya yaitu pementasan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIKSDA menjadi terintegrasi dengan RDS (*Regional Development Sistem*), serta penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :

- a. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;





- b. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
- d. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
- e. Optimalisasi tatakelola barang pakai habis berbasis akrual.

Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik.

Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2019	(Masih dalam tahap penilaian)

*Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*



Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 sampai dengan 2015 laporan keuangan Kabupaten Sidoarjo dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 opini BPK atas pemeriksaan LKPD naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni tanpa paragraph penjelasan, dan untuk tahun 2019 masih dalam proses penilaian.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan



## BAB V PENUTUP

### TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TA 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	4.058.099.090.414.00	4.422.599.226.798.15	(364.500.136.384.15)	108.98%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.531.360.832.030.00	1.809.832.261.491.15	(278.471.429.461.15)	118.18%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.694.744.640.648.00	1.711.271.242.511.00	(16.526.601.863.00)	100.98%
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	831.993.617.736.00	901.495.722.796.00	(69.502.105.060.00)	108.35%
	JUMLAH PENDAPATAN	4.058.099.090.414.00	4.422.599.226.798.15	(364.500.136.384.15)	108.98%

### PENDAPATAN ASLI DAERAH TA 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.531.360.832.030.00	1.809.918.566.314.52	(278.557.734.284.52)	118.19%
1.1.1.	Pajak Daerah	849.455.000.000.00	929.261.529.986.45	(79.806.529.986.45)	109.40%
1.1.2.	Retribusi Daerah	55.980.517.525.00	58.931.135.490.00	(2.950.617.965.00)	105.27%
1.1.3.	Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37.626.054.550.00	37.626.054.550.00	-	100.00%
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	588.299.259.955.00	784.099.846.288.07	(195.800.586.333.07)	133.28%
	JUMLAH	1.531.360.832.030.00	1.809.918.566.314.52	(278.557.734.284.52)	118.19%



**PAJAK DAERAH  
TA 2020**

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Pajak Daerah</b>	<b>849.455.000.000.00</b>	<b>929.261.529.986.45</b>	<b>(79.806.529.986.45)</b>	<b>109.40%</b>
Pajak Hotel	9.700.000.000.00	11.104.965.643.00	(1.404.965.643.00)	114.48%
Pajak Restoran	62.000.000.000.00	64.616.576.015.00	(2.616.576.015.00)	104.22%
Pajak Hiburan	2.730.000.000.00	2.814.119.899.00	(84.119.899.00)	103.08%
Pajak Reklame	14.000.000.000.00	14.690.375.957.00	(690.375.957.00)	104.93%
Pajak Penerangan Jalan	313.000.000.000.00	305.298.678.427.45	7.701.321.572.55	97.54%
Pajak Parkir	15.000.000.000.00	15.821.168.400.00	(821.168.400.00)	105.47%
Pajak Air Tanah	2.025.000.000.00	2.575.219.356.00	(550.219.356.00)	127.17%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	211.000.000.000.00	229.810.879.995.00	(18.810.879.995.00)	108.92%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	220.000.000.000.00	282.529.546.294.00	(62.529.546.294.00)	128.42%
Dst. ....				



**RETRIBUSI DAERAH**  
**TA 2020**

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>55.980.517.525.00</b>	<b>58.931.135.490.00</b>	<b>(2.950.617.965.00)</b>	<b>105.27%</b>
Retribusi Jasa Umum	26.389.800.000.00	28.668.170.054.00	(2.278.370.054.00)	108.63%
Retribusi Jasa Usaha	7.784.538.250.00	3.975.864.077.00	3.808.674.173.00	51.07%
Retribusi Perizinan Tertentu	21.806.179.275.00	26.287.101.359.00	(4.480.922.084.00)	120.55%
Dst. ....				



## HASIL BUMD DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TA 2020

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>				
Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	13.339.252.970.00	13.339.252.970.00	0.00	100.00%
PD Aneka Usaha "Delta Grafika"	342.131.732.00	342.131.732.00	0.00	100.00%
BPR "Delta Artha"	6.103.157.878.00	6.103.157.878.00	0.00	100.00%
Bank Jatim	17.841.511.970.00	17.841.511.970.00	0.00	100.00%
<b>JUMLAH</b>	<b>37.626.054.550.00</b>	<b>37.626.054.550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>



**PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TA 2020**

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan	396.371.500.00	1.538.252.711.00	(1.141.881.211.00)	388.08%
Penerimaan Jasa Giro	5.138.501.606.00	5.446.634.576.28	(308.132.970.28)	106.00%
Pendapatan Bunga Deposito	52.065.944.716.00	49.998.533.959.19	2.067.410.756.81	96.03%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	11.492.260.00	14.730.260.00	(3.238.000.00)	128.18%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	330.193.840.00	1.071.215.269.60	(741.021.429.60)	324.42%
Pendapatan Denda Pajak	1.263.216.561.00	1.545.535.986.00	(282.319.425.00)	122.35%
Pendapatan Denda Retribusi	185.344.502.00	325.741.443.00	(140.396.941.00)	175.75%
Pendapatan Dari Pengembalian	4.219.647.068.00	8.516.619.491.87	(4.296.972.423.87)	201.83%
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	188.000.000.00	151.447.243.00	36.552.757.00	80.56%
Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	3.898.130.000.00	6.542.073.743.00	(2.643.943.743.00)	167.83%
Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	608.848.832.00	758.797.604.00	(149.948.772.00)	124.63%
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	519.993.569.070.00	707.529.334.050.32	(187.535.764.980.32)	136.07%
Penjualan Hasil Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00%
Penjualan Hasil Raskin	0.00	0.00	0.00	0.00%
Penjualan Hasil Pasar Murah	0.00	0.00	0.00	0.00%
Penerimaan Lain-lain	0.00	91.004.127.44	(91.004.127.44)	0.00%
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati		483.621.000.00		0.00%
Dana BOS Reguler	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pendapatan denda dari sewa aset pemda dari kesepakatan & kerjasama	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pendapatan dari klaim asuransi	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pendapatan dari piutang	0.00	0.00	0.00	0.00%
Dst. ....	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>JUMLAH</b>	<b>588.299.259.955.00</b>	<b>784.013.541.464.70</b>	<b>(195.714.281.509.70)</b>	<b>133.27%</b>



**PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN  
TA 2020**

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Dana Perimbangan</b>				
<b>Bagi Hasil Pajak</b>	122.763.886.000.00	138.962.730.155.00	<b>(16.198.844.155.00)</b>	<b>113.20%</b>
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	20.435.463.000.00	34.434.218.411.00	<b>(13.998.755.411.00)</b>	<b>168.50%</b>
Dana Alokasi Umum	1.157.958.587.000.00	1.149.801.473.000.00	<b>8.157.114.000.00</b>	<b>99.30%</b>
Dana Alokasi Khusus	59.298.215.000.00	42.884.335.429.00	<b>16.413.879.571.00</b>	<b>72.32%</b>
<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	334.288.489.648.00	345.188.485.516.00	<b>(10.899.995.868.00)</b>	<b>103.26%</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>1.694.744.640.648.00</b>	<b>1.711.271.242.511.00</b>	<b>(16.526.601.863.00)</b>	<b>100.98%</b>





**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH  
TA 2020**

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	831.993.617.736.00	901.495.722.796.00	(69.502.105.060.00)	108.35%
Pendapatan hibah dari Pemerintah	0.00	3.158.648.500.00	(3.158.648.500.00)	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	264.780.496.236.00	339.339.055.996.00	(74.558.559.760.00)	128.16%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	264.780.496.236.00	339.339.055.996.00	(74.558.559.760.00)	128.16%
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	0.00	0.00	0.00	
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya			0.00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	387.744.706.000.00	386.155.714.800.00	1.588.991.200.00	99.59%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.004.515.500.00	13.004.515.500.00	0.00	100.00%



**TARGET DAN REALISASI BELANJA  
TA 2020**

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH				
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.619.724.799.549.81	2.349.232.579.995.94	270.492.219.553.87	<b>89.67%</b>
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.562.349.662.607.76	2.092.440.790.398.71	469.908.872.209.05	<b>81.66%</b>
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.182.074.462.157.57	4.441.673.370.394.65	740.401.091.762.92	<b>85.71%</b>



**BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TA 2020**

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai	1.403.510.590.886.30	1.286.795.633.705.61	116.714.957.180.69	91.68%
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi	250.000.000.00	0.00	250.000.000.00	0.00%
2.1.4	Belanja Hibah	290.233.862.550.00	258.000.874.222.00	32.232.988.328.00	88.89%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	92.385.453.000.00	86.331.775.000.00	6.053.678.000.00	93.45%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	92.771.858.152.00	92.531.238.338.00	240.619.814.00	99.74%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	500.265.955.180.18	493.492.244.936.60	6.773.710.243.58	98.65%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	240.307.079.781.33	132.080.813.793.73	108.226.265.987.60	54.96%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.619.724.799.549.81</b>	<b>2.349.232.579.995.94</b>	<b>270.492.219.553.87</b>	<b>89.67%</b>



**BELANJA LANGSUNG  
TA 2020**

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2.	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1.	Belanja Pegawai	293.025.497.180.60	274.664.603.103.64	18.360.894.076.96	93.73%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.497.967.754.184.95	1.298.523.315.895.60	199.444.438.289.35	86.69%
2.2.3.	Belanja Modal	771.356.411.242.21	519.252.871.399.47	252.103.539.842.74	67.32%
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>		<b>2.562.349.662.607.76</b>	<b>2.092.440.790.398.71</b>	<b>469.908.872.209.05</b>	<b>81.66%</b>



## BAB VI

### INOVASI DAERAH

No	1. Nama Perangkat Daerah/Inovator	2. Nama Inovasi
1	Dinas PMD Kab. Sidoarjo - Desa Kedungturi	PRA-PAUD
2	Dibas PMD kab.sidoarjo Bundes subur makmur	Pengolahan sampah dan pelayanan publik
3	Dinas PMD kab sidoarjo. Pujasera sumbar rezeki	Pujasera
4	Dinas pmd kab sidoarjo bumdes mitra abadi	Pengembangan Wisata Pulau LUSI (ditambahkan)
5	Kecamatan Tarik	SISUK (Sistem Surat Masuk)
6	SMP Negeri 4 Waru	KBK SAKTI
7	BKD KABUPATEN SIDOARJO	SISTEM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT (SIPEKAT)
8	BKD Kabupaten Sidoarjo	e_KGB (KENAIKAN GAJI BERKALA)
9	Dinas PMD Kab. Sidoarjo - Desa Lajuk	Pasar Desa
10	Badan Kepegawaian Daerah	Aplikasi Cuti Online
11	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO	SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO "SIPRAJA"
12	Dinas PMD Kab. Sidoarjo - BUMDesa Djati Kusumo desa sedengan mijen	Inovasi Multiguna Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Sapi, Penghasil Biogas, Tenaga Listrik, Pembakar Sampah Ramah Lingkungan, Pupuk Organik dan Pupuk Cair
13	Dinas PMD Kab. sidoarjo - BUMDesa Penatarsewu	Resto "Seba" (Sewu Barokah)
14	Dinas Perhubungan	Drive Thru
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO	SEDEKAH ILMU, ATASI KESULITAN USAHAMU DENGAN SEDEKAH
16	RSUD SIDOARJO	LERES (Layanan Elektronik Resep)
17	RSUD SIDOARJO	Si Maneis (Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency)
18	DPMD KABUPATEN SIDOARJO - BUMDESA "BINA SEJAHTERA" - DESA WATESARI	PENGEMBANGAN DESA WISATA
19	RSUD SIDOARJO	SIOKO (Sistem Informasi Kamar Operasi)
20	RSUD SIDOARJO	SANTRI RS (Sistem Antrian RS)
21	Dinas PMD Kabupaten Sudoarjo Bumdes Ngingas Mskmur Abadi Dinas PMD kabupaten Sudoarjo Desa Ngingas Waru	Mesin pembakar sampah ramah lingkungan dg technology sprayer
22	Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo	Inovasi Pembayaran Pajak Daerah
23	Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo	SILeHa – Sistem Integrasi Perolehan Hak (eBPHTB + Mutasi Penuh PBB)
24	RSUD SIDOARJO	Alamak (Anak Lahir Membawa Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga)
25	RSUD SIDOARJO	In KamRS (Informasi Kamar RS)
26	RSUD SIDOARJO	Remics (Rekam Medik Elektronik)
27	RSUD SIDOARJO	SEMeS 119 ( Sidoarjo Emergency Medical Services 119)
28	DPMPTSP Sidoarjo	SITARI (Surat Izin Cetak Mandiri)
29	DPMPTSP Sidoarjo	IMS (Intelligence Monitoring System)
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo	App Store Sidoarjo Tanggap (SIGAP)
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo	CSR Damkar
32	OPD Kecamatan Tulangan	Cepetmule
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Si-HIBOS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019

34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	Peduli Dilan (Pelayanan Peduli Disabilitas dan Lanjut Usia).
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Desa Pagerngumbuk	Kampung Lali Gadget
36	Dinas PMD Kab. Sidoarjo	Kampoeng Sinaoe - Desa Siwalanpanji
37	Dinas pmd desa simpang	Edukasi outbond/lingkungan
38	Dinas PMD Kab.sidoarjo - BUMDesa Simpang	Alas Outbound prambon
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO	SIDIRA (Sidoarjo Information Digital Library)
40	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO	BOLAM (Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat)
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO	TORPIN (Motor Pintar)
42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO	MPK (Mobil Perpustakaan Keliling)
43	BPKAD KABUPATEN SIDOARJO	SIKSDA (SISTEM INFORMASI KEUANGAN SIDOARJO)
44	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO	Aplikasi Sicantik ( Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak )
45	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	Kampung Berhenti Merokok
46	Sekretariat Daerah	e-buddy (Aplikasi Pendamping Kerja ASN dan Non ASN)
47	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO	LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI ASN
48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO	SIPANDU (Skrining Pendengaran Balita Di Posyandu)
49	SMP Negeri 4 Sidoarjo	CALISLINE (Baca Tuli Online)
50	Pukesmas Sekargadung	Cemilan Roti Kelapa (Cegah Bumil dan Neonatus Resiko Tinggi dean Kelas Bumil, Prenatal Yoga dan Whatapp
51	SMP Negeri 1 Wonoayu	LEGI JAWA NIKMAT (Legalisir ljasah Siswa Elektronik Otomatis)
52	RSUD SIDOARJO	SEJIWA DENGAN JEMPOL (Selamatkan Jiwa Wanita dan Anak dengan Penandaan Jempol)
53	Pukesmas Taman	KEPO GJ (Kader Peduli Orang denganGangguan Jiwa)
54	SMP Negeri 5 Sidoarjo	SI JAPELIN (Sistem Jadwal Penilaian Online)



55	SMP Negeri 1 Wonoayu	PNS BERBATIK (Pengiriman Nilai Siswa Berbasis TIK)
56	Puskesmas Krembung	CAK RAHMAN OKE (CAKep dan RAMaH Lansia di Puskesmas dengan One Stop Shopping Kita bErka)
57	Puskesmas Tarik Sidoarjo	SIMPLE (SISTEM INFORMASI PAPERLESS PUSKESMAS TARIK)
58	Pukesmas Krian	KOPISEMEL (Komunitas Peduli Kesehatan Mental)
59	Dinas PU dan PR Kabupaten Sidoarjo	APLIKASI M-BONK : Aplikasi Pengaduan Jalan Rusak Swakelola Berbasis Android Yang Bertujuan Untuk Mempercepat Perbaikan Jalan Rusak
60	Kecamatan Sukodono	BMW (Berkas Mlaku deWe) SEBAGAIROLE MODEL PELAYANAN ON-LINE DESA-KECAMATAN
61	Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo	e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
62	Badan Lingkungan Hidup	SIKOLING (Sistem Informasi Lingkungan)
63	SMPN 1 SEDATI	IKI AE SIKAPITAL (Sistem Penilaian Sikap dan Karakter)
34	KECAMATAN SIDOARJO	SEGATA BERKAH (SEDEKAH GAYA HIDUP KITA MENUJU BERKAH)
65	DPMPPTSP Sidoarjo	SIPPADU 2.0
66	Puskesmas Tulangan	GEPREK PEDES
67	Puskesmas Candi	BERKAT BERAMAL
68	Kecamatan Krembung	KGR (krembung guyub rukun)
69	Puskesmas prambon	CERDIK AKU
70	Puskesmas trosobo	KAMILEA 4.0
71	Puskesmas Buduran	AKSI TAKSI
72	Puskesmas Kota Sidoarjo	SIMASKOT
73	Puskesmas Gedangan	KEPITING KURUS
74	Puskesma Krembung	SEHATI DENGAN BILI
75	Puskesmas Porong	GENTONG BESAR
76	Puskesmas Wonoayu	GERUDUK BALDES
77	Puskesmas Sukodono	SIKAT SI DIA MASS





## BAB VII